

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

T A H U N

2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dapat tersusun.

Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan / sub kegiatan. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Batulicin, Februari 2023

KEPALA BADAN,

Eryanto Rais, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671209 199003 1 012

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Lampiran	viii
 Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 Bab II Hasil Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	17
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	27
 Bab III Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28

	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	36
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	39
Bab V	Penutup	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antar dokumen terhadap Ranwal Renja 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan perubahan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra s.d Tahun 2022	11
Tabel 2. 2	Rekapitulasi perkiraan realisasi kinerja tahun 2022 dan pencapaian renstra s.d tahun 2022	13
Tabel 2. 3	Realisasi keuangan	15
Tabel 2. 4	Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran s.d tahun 2022	18
Tabel 2. 5	Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran s.d tahun 2022 (dalam rupiah)	18
Tabel 2. 6	Realisasi indikator kinerja daerah s.d tahun 2022	20
Tabel 2. 7	Review terhadap rancangan RKPD tahun 2024	25
Tabel 3. 1	Target indikator tujuang dan sasaran renja tahun 2024	37
Tabel 3. 2	Target indikator kinerja kunci tahun 2024	38
Tabel 3. 3	Target indikator kinerja kunci tahun 2024 (dalam rupiah) ..	38
Tabel 4. 1	Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025	41

BAB I

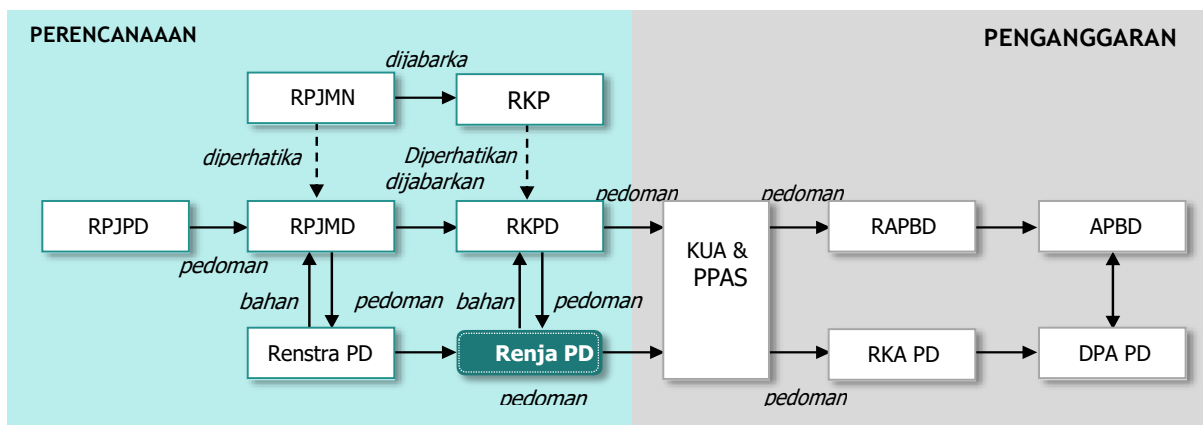
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024. Dimana penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pendapatan Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kkeuangan Daerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2024;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2023.

a. **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu**

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 2 (*satu*) program, 6 (*enam*) kegiatan serta 23 (*dua puluh tiga*) sub kegiatan, sebagaimana tercantum pada Renja Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “**Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah**” dengan target tahun 2022 sebesar 78,96 dan belum terealisasi.

Pada program ini terdapat 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan, dimana target indikator kinerja dari seluruh kegiatan maupun sub kegiatan tersebut telah tercapai 100%.

2) **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terfasilitasi**” dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 109,46 % (capaian 100 %). Pada program ini terdapat 1 (*satu*) kegiatan dan 10 (*sepuluh*) sub kegiatan dimana target indikator kinerja dari seluruh kegiatan tersebut telah terlaksana atau dengan capaian 93%.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah									
5.02	Kuangan									
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Hasil : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	80.24 indeks	78.70 indeks	78.96 indeks	0 indeks	0%	79.21 indeks	0 indeks	0%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234 ob	39 ob	39 ob	39 ob	100%	38 org	38 org	16%
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	40%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Tertib administrasi dan disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100%	0 pkt	2 pkt	40%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Umum Daerah	Keluaran : Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100%	1 pkt	2 pkt	40%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor *)	75 pkt	21 pkt	0 pkt	0 pkt	0%	8 pkt	21 pkt	28%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Bahan Logistik Kantor yang disediakan	72 pkt	7 pkt	9 pkt	9 pkt	100%	8 pkt	9 pkt	13%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 pkt	2 pkt	2 pkt	2 pkt	100%	2 pkt	4 pkt	33%
5.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	18 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	6 dok	33%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	2 lap	33%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 lap	3 lap	3 Lap	3 Lap	100%	3 lap	6 lap	33%
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 lap	6 lap	3 lap	3 lap	100%	3 lap	9 lap	25%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 lap	6 lap	9 lap	9 lap	100%	9 lap	15 lap	42%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100%	17 unit	17 unit	100%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Hasil : Persentase capaian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)	100 %	87.48 %	100 %	109.46 %	109.46%	100 %	%	0%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Hasil : Persentase pengelolaan pendapatan daerah yang terfasilitasi	100 %	63.56 %	100 %	93.00 %	93.00%	100 %	%	0%
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	30 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	10 dok	33%
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.	6 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	2 lap	33%
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.	6 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 Lap	2 Lap	33%
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 lap	4 lap	4 lap	4 lap	100%	1 Lap	8 Lap	33%
5.02.04.2.01.07	Penilaian PBB P2 serta BPHTB	Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya.	500 ob	0 ob	200 ob	683 ob	342%	300 ob	683 dok	137%
5.02.04.2.01.08	Penetapan wajib Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	33%
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	24 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	8 dok	33%
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	33%
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen keberatan pajak daerah	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	33%
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah laporan hasil pengendalian,pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	33%
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	24 lap	4 lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	8 Lap	33%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%	SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah	13,275,541,564	11,775,191,863	88.70	1,500,349,701
5.02	Keuangan	13,275,541,564	11,775,191,863	88.70	1,500,349,701
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	11,205,588,564	9,978,132,393	89.05	1,717,485,063
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,830,269,164	7,886,795,997	89.32	943,473,167
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,617,992,550	6,843,980,654	89.84	774,011,896
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,212,276,614	1,042,815,343	86.02	169,461,271
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23,265,000	23,265,000	100.00	-
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23,265,000	23,265,000	100.00	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Umum Daerah	1,211,216,400	1,192,629,760	98.47	18,586,640
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	6,900,000	6,900,000	100.00	-
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	417,502,500	407,406,600	97.58	10,095,900
5.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24,690,900	16,201,300	65.62	8,489,600
5.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,420,000	3,420,000	100.00	-
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	758,703,000	758,701,860	100.00	1,140
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	511,963,000	283,900,290	55.45	228,062,710
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125,400,000	89,893,290	71.69	35,506,710
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305,245,000	118,935,000	38.96	186,310,000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81,318,000	75,072,000	92.32	6,246,000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	628,875,000	591,541,346	94.06	37,333,654
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan	173,195,000	137,765,346	79.54	35,429,654
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	455,680,000	453,776,000	99.58	1,904,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,069,953,000	1,797,059,470	86.82	272,893,530
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,069,953,000	1,797,059,470	86.82	272,893,530
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	218,543,400	208,623,400	95.46	9,920,000
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	179,110,000	172,510,000	96.32	6,600,000
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	413,776,400	302,453,700	73.10	111,322,700
5.02.04.2.01.07	Penilaian PBB P2 serta BPHTB	52,910,000	52,760,000	99.72	150,000
5.02.04.2.01.08	Penetapan wajib Pajak Daerah	645,638,800	593,596,006	91.94	52,042,794
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	216,057,800	198,117,365	91.70	17,940,435
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	175,880,000	163,362,399	92.88	12,517,601
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22,190,800	5,280,800	23.80	16,910,000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	92,705,000	64,255,000	69.31	28,450,000
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	53,140,800	36,100,800	67.93	17,040,000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

Dari data pada Tabel 2.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar **Rp13.275.541.564,-** dari anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp11.775.191.863,- (88,70%)** dengan sisa sebesar **Rp1.500.349.701,- (11,30%)**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi yang terdiri dari :
 - a) Belanja pegawai dengan anggaran sebesar Rp7.753.472.550,- dengan realisasi sebesar Rp6.979.460.654,- atau 90,02% dan sisa anggaran sebesar Rp1.774.011.896,- atau 9,98%.
 - b) Belanja barang dan jasa ; anggaran sebesar Rp4.780.219.014,- dan terealisasi sebesar Rp4.314.751.209,- atau 90,26% dengan sisa anggaran Rp465.467.805,- atau 9,74%.

Untuk Belanja Operasi, sisa anggaran disebabkan oleh Belanja Insentif Pajak Daerah yang terealisasi berdasarkan target objek pajak daerah per triwulannya serta efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Belanja Modal yang terdiri dari :

Belanja modal ; anggaran sebesar Rp741.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp480.980.000,- atau 64,83% dan sisa anggaran sebesar Rp260.870.000,- atau 36,17%.

Untuk Belanja Modal, sisa anggaran umumnya dikarenakan efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian outputnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan :

- Pada sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah hanya terealisasi sebesar 73,06%, adanya belanja pengadaan aplikasi pelayanan online tidak terlaksana dikarenakan aplikasi pelayanan tersebut masih memanfaatkan aplikasi yang ada yang sudah terintegrasi walaupun tidak memakai nama “aplikasi pelayanan”.

- Pada sub kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah hanya terealisasi sebesar 23,80% dikarenakan belanja untuk penyelesaian keberatan berdasarkan pengajuan keberatan dari wajib pajak.
- Pada sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah hanya terealisasi sebesar 69,31% yang disebabkan tidak terlaksananya belanja tersebut dikarenakan salah satu belanja yaitu makan dan minum sudah di fasilitasi pihak relasi kerja.
- Pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah hanya terealisasi 67,93%, disebabkan yang disebabkan tidak terlaksananya belanja tersebut dikarenakan salah satu belanja yaitu makan dan minum sudah di fasilitasi pihak relasi kerja.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2022

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI	
			2021	2022	2023	2021	2022
1	Tujuan :						
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5%	5%	5%	-5.41%	34,10%
			148,038,767,391	155,440,705,760	163,212,678,552	158,296,425,254	212,269,957,941.47
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi SKPD	58.09	60.50	62.79	Tidak ada penilaian	Belum ada penilaian
1	Sasaran :						
	Meningkatnya Penerimaan Daerah	Persentase meningkatnya penerimaan Pajak Daerah	3.60%	7.20%	10.80%	-13.39%	37,60%
			55,655,101,531	58,437,856,607	61,359,686,938	49,906,083,634	68,672,010,018
		Persentase meningkatnya penerimaan Retribusi Daerah	11.65%	23.30%	34.95%	-9.07%	16,44%
			11,183,795,794	11,742,985,585	12,330,134,864	7,019,523,316	8,173,314,234
		Persentase PAD terhadap APBD	8.11%	9.44%	9.52%	8.80%	20,74%
			1,824,751,464,871	1,647,032,249,228	1,714,578,576,094	1,798,948,467,714	1,023,521,140,841
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	78.96	79.21	79.47	79.11	79.46

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD)”, tidak mencapai/melampaui target, dimana realisasinya sebesar 34,10 % dari target sebesar 5 %;
- b. Sasaran **“Meningkatnya Penerimaan Daerah”** dengan memiliki 3 (*tiga*) indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator “Persentase meningkatnya penerimaan pajak daerah” melampaui target, dimana realisasinya sebesar 37,60% dari target sebesar 7,20%;
 - 2) Indikator “Persentase meningkatnya penerimaan retribusi daerah” tidak mencapai/melampaui target sebesar 16,44%, dengan realisasi sebesar 23,30%;
 - 3) Indikator “persentase PAD terhadap APBD” melampaui target dengan realisasi 20,74% dari target 9,44%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pendapatan daerah juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Pendapatan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro atau indikator Kinerja Kunci (IKK) atau sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Hasil (Outcome) sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun tabel untuk penetapan indikator dari aspek indikator kinerja menurut bidang urusan tingkat sasaran (dampak/Impact) pemerintah daerah berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(13)
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan		√	10.41%	10.28%	10.30%	10.32%	9.51%	9.99%	10.30%	16.66%	
				1,421,846,277,665	1,512,032,249,228	1,584,578,576,094	1,660,752,344,292	1,664,669,726,868	2,124,126,094,914	1,584,578,576,094	1,402,363,776,046	
				148,038,767,391	155,440,705,760	163,212,678,552	171,373,374,974	158,296,425,254	212,269,957,941	163,212,678,552	233,596,653,914	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

B. PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

1. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023	2024
			2020	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Rasio PAD	%	1.10	1.05	1.20	1.00	1.48	0.69	0.94
a	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	167,344,871,876.69	148,038,767,391.00	158,296,425,254.00	155,440,705,760.00	212,033,802,090.64	163,212,678,552.00	233,596,653,914.00
b	Jumlah PDRB non Migas	Rp.	13,175,930,000,000.00	21,676,000,000,000.00	13,207,839,720,000.00	22,565,000,000,000.00	14,351,780,150,000.00	23,700,000,000,000.00	24,950,000,000,000.00

2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023	2024
			2020	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	94.20	103.64	-99.90	114.03	-99.90	125.46	-99.83
a	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	Rp.	167,344,871,876.69	148,038,767,391.00	158,296,425,254.00	155,440,705,760.00	212,033,802,090.64	163,212,678,552.00	233,596,653,914.00
b	Total PAD dalam APBD	Rp.	1,606,289,371,025.69	1,421,846,277,665.00	1,664,670,905,778.00	1,512,032,249,228.00	2,124,126,094,913.64	1,584,578,576,093.50	1,402,363,776,046.00

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Secara umum kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2021 maupun Renja Tahun 2022 sudah tercapai. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan ada yang terlampaui pada tahun 2022 ini.
- b. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro dapat mencapai target, diantaranya adanya peningkatan pendapatan setelah pasca covid 19 dari seluruh sektor pajak. Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan analisa potensi kembali pasca covid 19 dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Badan Pendapatan Daerah sebagai SKPD urusan penunjang pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah.

Ada beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 terkait dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan antara lain :

1. Masalah Internal
 - a. Kualitas dan kuantitas SDM;
 - b. Memfasilitasi semua kebutuhan kerja dan biaya operasional;
2. Masalah Eksternal
 - a. Menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak;
 - b. Dukungan kepala daerah, DPRD dan SKPD terkait;

- c. Tegakan aturan;
- d. Rutin memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang kebijakan pemerintah daerah;
- e. Memberikan Reward dan punishment kepada wajib pajak;

Adapun juga permasalahan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain :

- a. Masih terbatasnya SDM terkait IT, bidang perpajakan maupun pelayanan publik.
- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerahnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi hambatan yang akan berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di tahun 2023 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Cakupan wilayah potensi yang cukup luas

Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang cukup luas memberikan tantangan bagi aparatur untuk mencari atau mengunjungi potensi pajak daerah dengan keterbatasan jumlah personil “pengejar PAD” serta sarana prasarana yang masih belum memadai.

2) Rendahnya kesadaran, kepatuhan, pemahaman masyarakat terhadap pajak.

Mindset masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak daerah untuk pembangunan di Kabupaten Tanah bumbu perlu dilakukannya secara rutin mensosialisasikan dengan menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak.

b. Peluang

Potensi objek serta wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup tinggi. Dengan cakupan wilayah yang cukup luas Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi yang cukup tinggi dimana potensi pajak tersebut terdapat pada setiap perusahaan-perusahaan besar pertambangan dan kelapa sawit.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pencapaian visi dan misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator dan targetnya. Badan Pendapatan Daerah sebagai SKPD urusan penunjang pemerintah daerah yang memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah mengelola pendapatan asli daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati. Karena itu Badan Pendapatan Daerah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

b. Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.

c. Peningkatan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknologi berbasis IT.

d. Peningkatan upaya penjangkauan wajib pajak guna optimalisasi atas potensi yang ada.

- e. Peningkatan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah baik secara internal maupun eksternal.
- f. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Badan Pendapatan Daerah.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2. 4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Tanah Bumbu

SKPD : Badan Pendapatan Daerah

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				16,744,657,838	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				18,383,445,052	
	Keuangan				16,744,657,838	Keuangan				18,383,445,052	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	79.73	13,420,880,758	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	79.73	13,250,189,052	
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	11,284,004,258	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	10,606,791,252	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Bumbu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 org/bln	9,653,824,530	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Bumbu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 org/bln	8,701,060,624	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanah Bumbu	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dok	1,630,179,728	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanah Bumbu	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dok	1,905,730,628	
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertib administrasi dan disiplin Pegawai Perangkat Daerah		19,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertib administrasi dan disiplin Pegawai Perangkat Daerah		48,000,000	
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Tanah Bumbu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	1 pkt	19,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Tanah Bumbu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	120 pkt	48,000,000	
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	1,371,495,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	1,689,233,800	
4	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 pkt	7,600,000	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 pkt	9,070,600	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 pkt	382,800,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 pkt	466,977,800	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 pkt	201,126,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 pkt	223,958,400	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah Bumbu	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 pkt	28,882,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah Bumbu	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 pkt	20,800,000	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tanah Bumbu	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	3,240,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tanah Bumbu	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	3,960,000	

NO	Rancangan Awal RKPd Tahun 2024					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Bumbu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 lap	734,107,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Bumbu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 lap	884,187,000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	3 dok	13,740,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	3 dok	80,280,000	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	342,327,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	360,023,000	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Bumbu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	1 lap	137,745,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Bumbu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	1 lap	112,000,000	
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 lap	100,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 lap	161,635,000	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 lap	104,582,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 lap	86,388,000	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas		403,554,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas		546,141,000	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Lapangan	Tanah Bumbu	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	153,554,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Lapangan	Tanah Bumbu	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	198,041,000	
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	250,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	348,100,000	
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase capaian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)	100%	3,323,777,080	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase capaian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)	100%	5,133,256,000	
VII	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase pengelolaan pendapatan daerah yang terfasilitasi	100%	3,323,777,080	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase pengelolaan pendapatan daerah yang terfasilitasi	100%	5,133,256,000	
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 dok	357,645,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 dok	362,949,000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 lap	543,927,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 lap	329,805,000	
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak & wajib pajak daerah	1 lap	332,871,080	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak & wajib pajak daerah	1 lap	326,730,900	
4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 lap	100,000,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 lap	50,000,000	
5	Penilaian PBB P2 serta BPHTB	Tanah Bumbu	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	300 op	263,400,000	Penilaian PBB P2 serta BPHTB	Tanah Bumbu	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	300 op	91,435,000	
6	Penetapan wajib Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dok	702,450,000	Penetapan wajib Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dok	580,857,400	
7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan penelitian dan verifikasi	4 dok	79,944,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan penelitian dan verifikasi	4 dok	279,139,200	
8	Penagihan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan pajak daerah	1 dok	421,100,000	Penagihan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan pajak daerah	1 dok	2,417,506,400	
9	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 dok	34,125,000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 dok	83,318,900	
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 dok	96,700,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 lap	528,966,200	
11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 lap	391,615,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 lap	82,548,000	

SUMBER : BADAN PENDAPATAN DAERAH, Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Badan Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab dalam pendapatan daerah.

Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tidak terdapat aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 arah kebijakan prioritas RKP antara lain :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar

Secara rinci 7 (*tujuh*) arah kebijakan RKP tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah ingin pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0-1 persen. Artinya pada tahun 2023 Indonesia harus menurunkan kemiskinan ekstrem 2,5 – 3 juta penduduk.

- b. Prioritas Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pemerintah akan konsentrasi terhadap kesehatan dan pendidikan.
- c. Prioritas Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*.
Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pengadaan pekerja yang layak.
- d. Prioritas mendorong pemulihan dunia usaha.
- e. Prioritas revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
- f. Prioritas ekonomi hijau.
Mengingat Indonesia akan mencapai net zero emission pada tahun 2060, jadi pembanguna rendah karbon dalam hal ini transisi energi penting dalam rangka respon terhadap perubahan iklim.
- g. Prioritas percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam hal ini pemerintah akan melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur terutama infrastruktur dasar yakni air bersih dan sanitasi.

Kemudian pada tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJPD tahun 2006-2025 dan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ke keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu **“Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis”**. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian.

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Sedangkan rumusan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah “**Akselerasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Maritim dan Agroindustri Menuju Masyarakat Madani**” dengan 5 (*lima*) prioritas daerah, yaitu :

1. **Membangun Manusia yang Unggul, Berdaya Saing dan Religius**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Rata-rata lama sekolah.
 - b. Peningkatan harapan lama sekolah.
 - c. Penyelenggaraan kabupaten sehat.
 - d. Pengendalian prevalensi stunting.
 - e. Peningkatan GERMAS.
 - f. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja.
 - g. Peningkatan jaminan social.
 - h. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan.
 - i. Peningkatan pembangunan kepemudaan.
 - j. Peningkatan prestasi olah raga.
 - k. Peningkatan ibadah social.
2. **Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Maritim dan Agroindustri**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan wisata pesisir.
 - b. Peningkatan daya saing produk perikanan
 - c. Peningkatan daya dukung lahan pertanian
 - d. Peningkatan pertumbuhan investasi
 - e. Peningkatan nilai tambah daya saing hasil industry, UMKM dan pertanian berkelanjutan.

3. **Percepatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
 - a. Peningkatan infrastruktur dasar
 - b. Peningkatan konektivitas
 - c. Pengembangan Kawasan prioritas
4. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pengelolaan persampahan.
 - b. Peningkatan kualitas air.
 - c. Peningkatan kualitas tutupan lahan.
5. **Peningkatan kualitas Birokrasi Berbasis Nilai-Nilai Religius**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
 - a. Penguatan reformasi birokrasi yang religious.
 - b. Peningkatan inovasi daerah.
 - c. Peningkatan perencanaan responsive gender.
 - d. Peningkatan pelayanan public.
 - e. Peningkatan tata kelola data.
 - f. Peningkatan kompetensi aparatur.
 - g. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
 - h. Peningkatan pendapatan asli daerah.
 - i. Dukungan pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Makro yang ditetapkan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024, antara lain :

1. Peningkatan IPM
2. Angka Pengangguran
3. Pertumbuhan ekonomi
4. Angka kemiskinan
5. Gini Ratio
6. Indeks kualitas lingkungan hidup

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah mendukung pencapaian prioritas ke 5 (lima) yaitu “**Peningkatan kualitas Birokrasi Berbasis Nilai-Nilai Religius**”. Adapun fokus dari beberapa prioritas yang terkait dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah.
peningkatan kapasitas sumber daya apartur yang berkualitas baik dari aspek pengetahuan dalam menerapkan nilai-nilai agama atau spiritual yang mendasari sikap dan perilaku maupun keterampilan dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah yang profesional.
2. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima berbasis digital.
Penyelenggaraan pelayanan yang baik diperlukan pada pembinaan dan Peningkatan sistem pengelolaan pendapatan daerah diperlukan sarana prasarana penunjang yang memadai dan berkualitas dalam operasionalisasi penerimaan pendapatan yang berbasis digital atau informasi teknologi (IT). Hal ini penting untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap wajib pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
Intensifikasi antara lain :
 - ✓ Meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan pajak;
 - ✓ Peningkatan jumlah wajib pajak;
 - ✓ Peningkatan sistem pembukuan berbasis teknologi;
 - ✓ Perbaikan administrasi pungutan maupun operasional;
 - ✓ Peningkatan kualitas pengendalian, pengawasan, monitoring & evaluasi pungutan pendapatan;
 - ✓ Penerapan pemberian sanksi bagi wp yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - ✓ Peningkatan SDM pengelola pajak daerah dengan cara mengikutisertakan program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, diklat fungsional perpajakan, teknologi informasi perpajakan & manajerial serta

diklat-diklat keuangan daerah.

Ekstensifikasi antara lain :

- ✓ Penciptaan sumber-sumber pajak & retribusi daerah serta subyek pajak & retribusi baru.

Contoh :

Melakukan penyisiran terhadap subjek pajak & retribusi baru.

- ✓ Membuat kebijakan investasi & kerjasama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan daerah.

Contoh :

Membuka lahan milik Pemda yang masih mengganggu & diciptakan menjadi wilayah bisnis baru.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator tujuan **“Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”**.
2. Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang baik dan melayani dengan indikator **“Nilai Indeks Reformasi Birokrasi SKPD”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu **“Meningkatnya Penerimaan Daerah”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase capaian pendapatan pajak daerah terhadap PAD
2. Persentase capaian pendapatan retribusi daerah terhadap PAD
3. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET 2024
TUJUAN :				
I	Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	5.00%
SASARAN :				
1	Meningkatnya Penerimaan Daerah	Persentase meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase	14.40%
2		Persentase meningkatnya penerimaan retribusi daerah	Persentase	46.60%
3		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	Persentase	9.60%
TUJUAN :				
II	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang baik dan melayani	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi SKPD	Indeks	58.86
SASARAN :				
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Indeks	79.73

Sumber : Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 serta Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Secara khusus, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”** dan **“Nilai Indeks Reformasi Birokrasi SKPD”** dengan indikator sasaran (1) Persentase meningkatnya penerimaan pajak daerah, (2) Persentase meningkatnya penerimaan retribusi daerah (3) Persentase PAD terhadap dan (4) Predikat SAKIP;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 (*dua*) program, yang terdiri dari 1 (*satu*) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin / non teknis), dan 1 (*satu*) program pengelolaan pendapatan daerah (Teknis);
2. Jumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 (*lima*) kegiatan, dan 25 (*dua puluh lima*) sub Kegiatan;
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebesar Rp16.774.657.838,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan perincian :
 - a. Rp13.250.880.758,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin/non teknis).
 - b. Rp3,523,777,080,- untuk program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah								
5.02	Keuangan				16,744,657,838				18,043,306,264
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah		79.47	13,420,880,758			79.73	14,519,529,184
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100%	11,284,004,258			100%	12,412,404,684
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanbu	38 org/bln	9,653,824,530	APBD		38 org/bln	10,619,206,983
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Tanbu	1 dok	1,630,179,728	APBD		1 dok	1,793,197,701
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi dan disiplin Pegawai Perangkat Daerah			19,500,000				19,500,000
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Kab. Tanbu	1 pkt	19,500,000	APBD		1 pkt	19,500,000
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100%	1,371,495,000			100%	1,431,284,000
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Tanbu	2 pkt	7,600,000	APBD		2 pkt	8,300,000
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Tanbu	25 pkt	382,800,000	APBD		25 pkt	421,104,000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Tanbu	1 pkt	201,126,000	APBD		1 pkt	221,239,000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Tanbu	6 pkt	28,882,000	APBD		6 pkt	31,770,000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Tanbu	3 dok	3,240,000	APBD		3 dok	3,240,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Tanbu	1 lap	734,107,000	APBD		1 lap	731,891,000
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Kab. Tanbu	1 dok	13,740,000	APBD		1 dok	13,740,000
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	342,327,000			100%	352,786,000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	Kab. Tanbu	1 lap	137,745,000	APBD		1 lap	137,745,000
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Tanbu	1 lap	100,000,000	APBD		1 lap	100,000,000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Tanbu	1 lap	104,582,000	APBD		1 lap	115,041,000
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			403,554,500				303,554,500
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Tanbu	18 unit	153,554,500	APBD		18 unit	153,554,500
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gdung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaranan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Tanbu	2 unit	250,000,000	APBD		2 unit	150,000,000
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)		100%	3,323,777,080			100%	3,523,777,080
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah yang terfasilitasi		100%	3,323,777,080			100%	3,523,777,080
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Tanbu	5 dok	357,645,000	APBD		5 dok	257,645,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Tanbu	1 lap	543,927,000	APBD		1 lap	643,927,000
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak & wajib pajak daerah	Kab. Tanbu	1 lap	332,871,080	APBD		1 lap	332,871,080
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Tanbu	1 lap	100,000,000	APBD		1 lap	100,000,000
5.02.04.2.01.07	Penilaian PBB P2 serta BPHTB	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Tanbu	300 op	263,400,000	APBD		300 op	263,400,000
5.02.04.2.01.08	Penetapan wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Tanbu	1 dok	702,450,000	APBD		1 dok	702,450,000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Kab. Tanbu	4 dok	79,944,000	APBD		4 dok	79,944,000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan pajak daerah	Kab. Tanbu	1 dok	421,100,000	APBD		1 dok	421,100,000
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Tanbu	1 dok	34,125,000	APBD		1 dok	34,125,000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Tanbu	1 dok	96,700,000	APBD		1 dok	96,700,000
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Kab. Tanbu	1 lap	391,615,000	APBD		1 lap	391,615,000

BAB V

P E N U T U P

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Pendapatan Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah ini berpedoman pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah ini juga berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Pendapatan Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024;

2. berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 untuk setiap triwulannya;
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan disusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2024.

Batulicin, Februari 2023

Kepala Badan,

Eryanto Rais, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671209 199003 1 012